



STRATEGI DIPLOMASI TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI DAMPAK KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN UNTUK MENJAGA STABILITAS NASIONAL

*THE STRATEGIC DIPLOMACY OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMED
FORCES IN RESPONDING TO THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT TO
SAFEGUARD NATIONAL STABILITY*

Firman Manurung*, Haposan Simatupang, Afrizal Hendra
Universitas Pertahanan

koresponden: firman_manurung@gmail.com

Abstrak (Bahasa Indonesia) – Konflik di Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu tantangan utama dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap stabilitas nasional Indonesia. Keberadaan klaim sepihak Tiongkok melalui nine-dash line, meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta maraknya pelanggaran wilayah di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menuntut respons strategis yang terintegrasi, termasuk melalui jalur diplomasi pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi dinamika konflik di Laut Cina Selatan serta kontribusinya terhadap stabilitas nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 8 (delapan) narasumber kunci dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, dan lembaga akademik, serta analisis dokumen resmi dan observasi kegiatan diplomasi TNI. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi TNI berperan penting dalam menjaga kepentingan nasional melalui kerja sama militer bilateral dan multilateral, partisipasi aktif dalam forum regional seperti ADMM dan WPNS, serta penguatan citra Indonesia sebagai middle power yang mendukung tatanan berbasis aturan (rules-based order). Diplomasi TNI juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kepercayaan, mencegah eskalasi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi konflik di kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi TNI merupakan elemen krusial dalam strategi pertahanan Indonesia yang adaptif terhadap dinamika geopolitik dan berkontribusi langsung terhadap terciptanya stabilitas nasional. Ke depan, efektivitas diplomasi TNI perlu diperkuat melalui sinergi antarinstansi, modernisasi kemampuan personel, serta pemanfaatan forum kerja sama yang lebih responsif seperti format trilateral dan minilateral.

Kata Kunci: Diplomasi TNI, Laut Cina Selatan, Stabilitas Nasional, Strategi Pertahanan, Kerja Sama Militer.



Abstract (English) – *The conflict in the South China Sea (SCS) represents one of the main challenges within the Indo-Pacific security architecture, directly and indirectly affecting Indonesia's national stability. China's unilateral claims through the nine-dash line, the escalating rivalry between the United States and China, and the increasing frequency of territorial violations around Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) demand an integrated strategic response, including through defense diplomacy channels. This study aims to analyze the Indonesian National Armed Forces' (TNI) diplomacy strategy in addressing the dynamics of the South China Sea conflict and its contribution to maintaining national stability. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with eight key informants from the Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, the TNI Headquarters, and academic institutions, as well as through the analysis of official documents and observations of TNI's diplomatic activities. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, with source triangulation. The findings indicate that TNI diplomacy plays a vital role in safeguarding national interests through bilateral and multilateral military cooperation, active participation in regional forums such as the ADMM and WPNS, and strengthening Indonesia's image as a middle power that supports a rules-based order. TNI diplomacy also functions as a strategic instrument for confidence-building, conflict prevention, and enhancing interagency coordination in addressing regional tensions. This study concludes that TNI diplomacy is a critical element in Indonesia's adaptive defense strategy, contributing significantly to national stability amidst geopolitical shifts. Strengthening TNI diplomacy in the future requires greater interagency synergy, modernization of personnel capabilities, and the utilization of more responsive formats such as trilateral and minilateral cooperation.*

Keywords: *TNI Diplomacy, South China Sea, National Stability, Defense Strategy, Military Cooperation.*

Pendahuluan

Laut Cina Selatan (LCS) merupakan kawasan strategis dengan arti penting yang besar dalam aspek geopolitik, ekonomi, dan pertahanan. Kawasan ini menjadi jalur laut utama yang dikenal sebagai Sea Lines of Communication (SLOC) atau Sea Lines of Trade (SLOT), yang menyumbang sekitar sepertiga dari perdagangan dunia setiap tahunnya, termasuk sekitar 40% ekspor dan impor Indonesia (Wahyuni S., 2021). Dengan demikian, stabilitas di kawasan ini secara langsung mempengaruhi keamanan jalur logistik nasional dan internasional, yang menjadi krusial bagi perekonomian global dan Indonesia khususnya. Bagi Indonesia, nilai ekonomi yang terkait dengan stabilitas maritim di kawasan ini sangat besar. Hubungan dagang



Indonesia dengan Tiongkok sangat signifikan: pada 2024, impor Indonesia dari Tiongkok mencapai sekitar US\$73,85 miliar (31,4% dari total impor), sedangkan nilai ekspor non-migas Indonesia ke Tiongkok juga berada pada level yang besar (mis. Januari–Mei 2025 ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat puluhan miliar USD). Volumetrik perdagangan dan ketergantungan impor-ekspor ini menunjukkan bahwa gangguan pada SLOC atau ketidakstabilan di LCS dapat menimbulkan dampak ekonomi makro langsung terhadap Indonesia. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025).

Pada tahun 2021, Tiongkok mengubah klaim Nine Dash Line menjadi Ten Dash Line, yang memperluas klaim teritorial mereka di Laut Cina Selatan (Reuters, 2023). Perubahan ini merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut, meskipun klaim ini tidak diakui oleh hukum internasional. Keputusan Mahkamah Arbitrase pada 2016 telah membatalkan klaim Tiongkok atas wilayah tersebut, tetapi ketegangan masih tetap berlanjut (Permanent Court of Arbitration, 2016). Selain itu, ketegangan ini diperburuk oleh intensifikasi kehadiran militer Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan, yang semakin memperkeruh hubungan diplomatik di Laut Cina Selatan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis di jantung Indo-Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, khususnya di Laut Cina Selatan. Salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah diplomasi TNI. Diplomasi TNI merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama militer, dan menjaga stabilitas kawasan melalui pendekatan non-konfrontatif. Dalam konteks tersebut, peran diplomasi TNI menjadi penting sebagai instrumen non-konfrontatif yang dapat memperkuat posisi Indonesia, membangun confidence-building measures, dan menjaga stabilitas operasional di perairan Natuna dan kawasan LCS pada umumnya. Upaya-upaya seperti patroli bersama, latihan multilateral, serta koordinasi penegakan hukum



maritim harus didukung oleh landasan strategis dan kapabilitas yang memadai mengingat skala ekonomi dan militer aktor eksternal di kawasan.

Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan berpotensi membawa dampak besar terhadap stabilitas nasional Indonesia, baik dari segi keamanan maupun ekonomi. Beberapa dampak yang dapat diperkirakan jika eskalasi konflik meningkat, antara lain:

- a. Dampak Keamanan Nasional. Yaitu peningkatan ancaman militer, ketegangan di Laut Cina Selatan dapat memicu peningkatan aktivitas militer baik dari negara-negara yang terlibat langsung (seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Malaysia), maupun negara besar lainnya seperti Amerika Serikat. Hal ini dapat meningkatkan ancaman terhadap keamanan wilayah perairan Indonesia, terutama terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Peningkatan ketegangan regional dapat menimbulkan terjadinya konflik berskala besar, termasuk potensi perang terbuka, akan mempengaruhi kestabilan kawasan Asia Tenggara dan Indonesia sebagai negara yang terletak di tengah jalur maritim strategis. Perang atau bahkan ketegangan militer yang melibatkan negara besar dapat menyebabkan instabilitas yang meluas di wilayah Indonesia.
- b. Dampak ekonomi berupa gangguan terhadap perdagangan dan aliran energi. Laut Cina Selatan merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting untuk perdagangan internasional, termasuk ekspor-impor Indonesia. Jika konflik meluas, gangguan terhadap alur perdagangan dan keamanan jalur pelayaran dapat merugikan perekonomian Indonesia, terutama sektor perikanan, energi, dan logistik.
- c. Penurunan penjualan alutsista. Ketegangan yang meningkat dapat mengalihkan fokus anggaran negara, sehingga berpotensi menurunkan alokasi untuk penjualan alutsista domestik. Sebaliknya, jika Indonesia terpaksa berpartisipasi dalam konflik, biaya pengadaan alutsista untuk memperkuat pertahanan negara juga akan meningkat.



- d. Kenaikan harga dan fluktuasi ekonomi. Ketegangan atau perang yang melibatkan negara-negara besar di Laut Cina Selatan bisa memengaruhi harga energi global (terutama minyak dan gas) dan menyebabkan inflasi yang akan meningkatkan harga barang dan bahan pokok di Indonesia. Hal ini akan memberi tekanan pada daya beli masyarakat dan perekonomian domestik.
- e. Fluktuasi kurs rupiah. Konflik besar berpotensi menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya. Ketidakpastian pasar global dapat memicu penurunan nilai tukar Rupiah yang lebih tajam, menyebabkan peningkatan biaya impor dan inflasi domestik.
- f. Dampak sosial dan politik. Proliferasi isu sosial dan kesenjangan ekonomi, dengan ketegangan internasional dapat memperburuk ketegangan domestik di Indonesia, terutama dalam konteks ketidakpuasan sosial terhadap kebijakan pemerintah dalam merespons ketegangan luar negeri. Kenaikan harga barang, khususnya energi dan kebutuhan dasar, dapat memicu ketidakpuasan yang lebih luas di masyarakat.
- g. Peningkatan ketegangan antar negara dan diplomasi internasional. Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat perlu menjalankan diplomasi yang hati-hati dalam menanggapi eskalasi ini. Salah langkah dalam menyikapi ketegangan tersebut bisa merusak hubungan diplomatik dengan negara-negara besar dan regional, yang berpotensi mempengaruhi kepentingan politik luar negeri Indonesia.

Diplomasi TNI berfokus pada peningkatan hubungan militer dengan negara-negara sahabat, mencegah eskalasi konflik, serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan politik global. Beberapa bentuk nyata diplomasi TNI yang telah dijalankan antara lain latihan bersama, seperti Garuda Shield dengan Amerika Serikat dan negara mitra lainnya, keterlibatan dalam ASEAN Maritime Exercise, serta partisipasi dalam forum ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus. Diplomasi ini juga mencakup misi kemanusiaan, seperti bantuan pasca-bencana di



Filipina dan Myanmar, serta kerja sama pertahanan bilateral dengan negara-negara seperti Australia, Singapura, dan Jepang.

Namun demikian langkah diplomasi TNI tidak dapat dipisahkan dengan sea power Indonesia, yang menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi dampak konflik di LCS dan menjaga stabilitas perairan nasional Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan di kawasan Indo-Pasifik secara alami membutuhkan kemampuan pengendalian laut (sea power) yang kuat sebagai bangsa maritim. Konsep sea power tidak hanya mencakup kekuatan armada perang atau armada niaga, tetapi meliputi seluruh potensi kekuatan nasional yang memanfaatkan laut sebagai ruang operasional. Bagi Indonesia, sea power menjadi landasan dalam membangun kekuatan maritim untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dalam upaya menjadi bangsa bahari yang besar. Secara umum, sea power dipahami sebagai kondisi ketika suatu negara memiliki kekuatan laut yang memadai dan proporsional. Di dalamnya termasuk kemampuan menguasai dan memanfaatkan laut (sea control), sekaligus mencegah pihak lawan menggunakannya (sea denial). Karena itu, pengendalian laut sangat erat kaitannya dengan tingkat sea power suatu negara. Bagi Indonesia, laut memiliki fungsi strategis yang vital bagi keberlangsungan bangsa, mulai dari sebagai pemersatu wilayah, sumber daya, jalur perhubungan, wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, instrumen pembangunan pengaruh, hingga media pertahanan negara. Dengan demikian, Sea Power Indonesia memegang peranan penting dalam mendukung diplomasi nasional di arena geopolitik dan geostrategis Indo-Pasifik. (Sea Power Indonesia di Era Indo Pasifik, Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, 2024).

Melalui gelar diplomasi yang berbasis regulasi dan diperkuat teori, TNI tidak hanya memperlihatkan kemampuannya dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mempromosikan citra Indonesia sebagai kekuatan yang mendukung perdamaian, stabilitas, dan kerja sama regional. Diplomasi TNI ini sejalan dengan



upaya Indonesia untuk menjadi aktor utama dan berperan aktif dalam kerja sama pertahanan di kawasan Asia-Pasifik, sehingga stabilitas nasional dapat terwujud.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggali fenomena sosial dan strategis secara mendalam, khususnya dalam konteks hubungan internasional dan pertahanan negara. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara menyeluruh dinamika yang terjadi, termasuk persepsi, strategi, dan kebijakan para aktor terkait di lapangan.

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu rancangan penelitian yang bertujuan menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena secara sistematis dan faktual. Dalam konteks penelitian ini, desain tersebut digunakan untuk menguraikan bagaimana strategi diplomasi TNI dirancang dan dijalankan dalam menghadapi dinamika konflik di kawasan Laut Cina Selatan, serta bagaimana strategi tersebut berkontribusi terhadap upaya menjaga stabilitas nasional Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan paling strategis dan sekaligus paling sensitif dalam lanskap geopolitik dan keamanan regional Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Kawasan ini tidak hanya menjadi jalur perdagangan global yang sangat penting, tetapi juga menjadi ruang persinggungan berbagai kepentingan nasional dan internasional, terutama antara negara-negara ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, dan kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat.

Kawasan Laut Cina Selatan, selain menjadi titik persinggungan kekuatan militer besar dunia, juga menjadi arena tarik-menarik inisiatif ekonomi melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang didorong oleh Tiongkok (Rolland N., 2019). Proyek ini



telah memperluas pengaruh Beijing di sektor pelabuhan, infrastruktur logistik, dan kerja sama energi di beberapa negara ASEAN (ASEAN Studies Center, 2023). Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan strategis: menjaga kedaulatan dan netralitas, sembari tetap menjalin hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Disisi lain, Amerika Serikat berupaya melakukan upaya perimbangan pengaruh di Indo-Pasifik khususnya bidang ekonomi, yaitu dengan mengusung *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF), (U.S. Department of Commerce, 2022).

Putusan Mahkamah Arbitrase (*Permanent Court of Arbitration/PCA*) sesuai Pasal 286 UNCLOS 1982 Arbitrase Khusus pada tanggal 12 Juli 2016 mengenai sengketa Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Filipina memiliki status hukum yang mengikat (*legally binding*) di bawah hukum internasional, tetapi ditolak secara tegas oleh Tiongkok. Faktor penyebab Tiongkok menolak putusan Arbitrase dapat diketahui dari rasio logis dan rasio dendi yang perlu diungkap dalam penelitian ini. Berikut rincian status hukumnya (rasio legal) yang mengikat secara hukum (*Legally Binding*) sebagai berikut:

- a. Putusan ini dikeluarkan oleh Tribunal Arbitrase yang dibentuk berdasarkan Annex VII dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Baik Filipina maupun Tiongkok adalah negara pihak UNCLOS.
- b. Dasar hukum pengajuan konflik batas laut ada pada pasal 284 yaitu prosedur sukarela, dan menurut pasal 286 apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sukarela dapat dibawa ke Tribunal Internasional, Mahkamah Internasional (ICJ), Arbitrase atau Arbitrase Khusus.
- c. Pasal 287 UNCLOS 1982.
- d. Pasal 288 dan Pasal 296 UNCLOS secara jelas menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Tribunal Arbitrase adalah bersifat final dan mengikat bagi para pihak dalam sengketa.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum internasional, putusan ini menciptakan kewajiban hukum bagi kedua belah pihak untuk mematuhi. Namun ada opsi lain berdasarkan pasal 298 berikut:

- a. Meskipun ada prosedur wajib, UNCLOS juga memungkinkan negara-negara untuk membuat deklarasi untuk mengecualikan diri dari beberapa prosedur wajib yang mengikat untuk jenis sengketa tertentu, termasuk sengketa mengenai delimitasi batas laut, sengketa militer, atau sengketa historis.
- b. Namun, ada batasan, meskipun negara dapat mengecualikan diri dari prosedur yang mengikat, mereka tetap diwajibkan untuk menukarkan pandangan dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Jika negosiasi gagal, masih ada kewajiban untuk tunduk pada prosedur yang tidak mengikat (seperti konsiliasi). Tiongkok menggunakan pengecualian ini untuk menolak yurisdiksi dalam kasus arbitrase Laut Cina Selatan.

Penolakan Tiongkok terhadap putusan sidang Mahkamah Arbitrasi, menjadi rasio legalnya, Tiongkok telah meratifikasi UNCLOS 1982 pada 7 Juni 1996. Namun cara menginterpretasikan agak berbeda khususnya aspek klaim historis dan hak-hak di LCS. Penolakan Tiongkok terhadap putusan arbitrase Laut Cina Selatan tahun 2016 adalah contoh paling menonjol dari perbedaan ini, meskipun putusan tersebut secara eksplisit didasarkan pada UNCLOS dan Tiongkok tidak berpartisipasi dalam sidang Arbitrase.

Meskipun mengikat secara hukum, Tiongkok telah menolak putusan tersebut secara total dan eksplisit sejak awal. Tiongkok menyatakan tidak berpartisipasi dalam proses arbitrase, tidak mengakui yurisdiksi tribunal, dan menganggap putusan tersebut "batal dan tidak memiliki kekuatan hukum". Tiongkok berpendapat bahwa sengketa kedaulatan atas pulau-pulau tidak berada dalam yurisdiksi UNCLOS, dan UNCLOS hanya mengatur hak maritim. Tiongkok juga mengklaim "hak historis" atas sebagian besar Laut Cina Selatan melalui klaim "sembilan garis putus-putus" (*nine-dash line*), yang ditolak oleh putusan arbitrase.



Peran Diplomasi TNI dalam Menyikapi Konflik Laut Cina Selatan

Peran ini juga diperkuat oleh diplomasi pertahanan yang dilaksanakan melalui mekanisme bilateral maupun multilateral. Salah satu pendekatan penting yang ditekankan oleh responden dari Kementerian Pertahanan adalah pelibatan aktif Indonesia dalam forum ADMM-Plus, di mana TNI tidak hanya hadir sebagai peserta tetapi juga berperan dalam menyusun agenda kerja sama pertahanan kawasan. Dalam forum tersebut, TNI memainkan peran penting dalam mempromosikan prinsip non-intervensi, penyelesaian damai sengketa, dan penghormatan terhadap hukum laut internasional.

Diplomasi militer juga menjadi sarana penting dalam membangun kepercayaan strategis (*strategic trust-building*), (Cotter, A., & Forster, A., 2004). Responden dari Sops TNI menjelaskan bahwa melalui latihan bersama dan keterlibatan aktif dalam forum-forum kerja sama regional, TNI telah berhasil membangun kanal komunikasi taktis yang dapat mencegah salah persepsi dan meningkatkan transparansi militer antarnegara. Kanal ini menjadi krusial dalam merespons eskalasi atau insiden tak disengaja di kawasan LCS, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan ZEE Indonesia (Emmers, R., 2020).

Selain kegiatan formal, perwira TNI juga dilibatkan dalam dialog lintas pertahanan seperti Track 1.5 dan Track 2 Diplomacy. Track 1.5 adalah bentuk diplomasi yang melibatkan pertemuan antara pejabat pemerintah (biasanya secara informal atau tidak mewakili posisi resmi negara secara langsung) dan aktor non-pemerintah seperti akademisi, think tank, atau tokoh masyarakat. Ini merupakan forum semi-resmi yang memungkinkan diskusi lebih terbuka dan eksploratif tanpa tekanan politik formal. Sebagai contoh: dialog strategis yang dihadiri perwira TNI aktif bersama peneliti pertahanan dari luar negeri, forum seperti Shangri-La Dialogue, yang mempertemukan pejabat tinggi militer dan sipil dengan akademisi dan analis kebijakan (IISS, 2023).



Selanjutnya, Track 2 diplomacy adalah bentuk diplomasi yang sepenuhnya non-pemerintah, dilakukan oleh individu atau institusi yang tidak mewakili negara secara formal, seperti akademisi, tokoh LSM, purnawirawan militer, atau mantan pejabat. Tujuannya adalah membangun pemahaman, mengurangi ketegangan, dan merancang solusi kreatif atas konflik yang sulit dibahas dalam forum resmi. Contoh: Pertemuan antar think tank dari negara-negara ASEAN dan China untuk merancang kerangka kerja pengelolaan konflik di Laut Cina Selatan dan Workshop yang dihadiri purnawirawan TNI bersama pakar keamanan regional (ASEAN–China Think Tank Network., 2023). Keterlibatan perwira TNI dalam Track 1.5 dan Track 2 menunjukkan pendekatan diplomasi pertahanan yang inklusif dan fleksibel, yang memperkuat posisi Indonesia melalui dialog strategis lintas batas formalitas. Hal ini juga memperluas jalur komunikasi yang dapat digunakan dalam mengelola konflik dan meningkatkan kepercayaan antarnegara (Laksmiana, E. A., 2021).

Keterlibatan ini memungkinkan TNI untuk turut menyuarakan perspektif Indonesia mengenai keamanan maritim, pentingnya stabilitas kawasan, serta komitmen terhadap norma internasional. Dalam banyak kasus, partisipasi TNI dalam forum non-pemerintah juga membuka peluang kolaborasi pertahanan sipil dan meningkatkan pemahaman lintas budaya militer di kawasan.

Secara keseluruhan, diplomasi TNI telah berevolusi menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang adaptif terhadap kompleksitas konflik Laut Cina Selatan. Peran ini tidak terbatas pada penguatan aliansi, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko dan pencegahan konflik. Oleh karena itu, diplomasi militer tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki dimensi strategis yang nyata dalam membentuk ekosistem keamanan kawasan yang stabil dan inklusif (Gindarsah, I., 2018).

Diplomasi TNI dalam konteks Laut Cina Selatan dijalankan sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Republik Indonesia, 2004). Dalam praktiknya, diplomasi ini berfungsi sebagai instrumen soft power yang mengedepankan

kehadiran simbolik, penguatan kerja sama militer, serta komunikasi strategis dengan negara-negara mitra di kawasan (Laksmana, E.A., 2021).

Tabel 1. Misi dan Kegiatan Diplomasi TNI di Laut Cina Selatan (2020–2023)

Jenis Kegiatan	Contoh Pelaksanaan	Tujuan Strategis
Latihan Bersama	RIMPAC, MNEK, Garuda Shield	Interoperabilitas & kepercayaan mitra
Forum Multilateral	ADMM-Plus, WPNS, ARF	Dialog keamanan & pengaruh regional
Port Visit & Naval Ops	Singapura, Vietnam, India	Simbol kehadiran & kerja sama militer
Dialog Track 1.5/2	Seminar dan konferensi regional	Pertukaran pemahaman dan soft diplomacy

Sumber: diolah oleh Peneliti (2025)

Selain sebagai kekuatan pertahanan negara, TNI juga memainkan peran penting dalam membentuk citra dan pengaruh strategis Indonesia di tingkat regional maupun global. Konsep "soft power" yang diperkenalkan oleh Joseph Nye mengacu pada kemampuan sebuah negara untuk memengaruhi negara lain melalui daya tarik nilai, budaya, dan kebijakan, bukan dengan paksaan militer. Dalam konteks ini, TNI menjadi salah satu instrumen penting dalam menjalankan diplomasi pertahanan berbasis soft power. Terkait visi jangka panjang peran TNI dalam strategi soft power global sebuah sumber mengutip, "Dalam peta jalan kebijakan pertahanan menuju Indonesia Emas 2045, soft power militer termasuk pengembangan kekuatan global menjadi salah satu agenda strategis nasional." (Defense Policy Roadmap Toward Golden Indonesia 2045, ResearchGate).

Salah satu bentuk nyata penerapan soft power oleh TNI adalah melalui keterlibatan dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Keikutsertaan pasukan Garuda di berbagai misi seperti di Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan Selatan telah meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang berkontribusi terhadap



perdamaian dunia. Kehadiran TNI dalam misi ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan operasional, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan stabilitas internasional.

Selain itu, penyelenggaraan latihan bersama dengan negara sahabat dan partisipasi aktif dalam forum-forum multilateral juga menjadi instrumen strategis soft power. Kegiatan seperti "Komodo Exercise", "Rimpac", dan "Garuda Shield" memperkuat hubungan militer dan membangun rasa saling percaya antar negara. Dalam setiap keterlibatannya, TNI tidak hanya membawa kemampuan tempur, tetapi juga nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, dan semangat kerja sama.

Dalam konteks regional, kehadiran TNI dalam forum ADMM-Plus dan WPNS dapat dilihat sebagai bentuk narasi strategis Indonesia yang menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan stabilitas kawasan. Melalui diplomasi TNI yang terbuka dan kooperatif, TNI berkontribusi dalam memperkuat norma kawasan, seperti penghormatan terhadap hukum internasional, penyelesaian damai sengketa, dan kebebasan navigasi.

Narasi strategis yang dibangun oleh TNI juga diperkuat melalui penggunaan media dan komunikasi strategis. Publikasi kegiatan TNI di media internasional, partisipasi dalam konferensi pertahanan, dan keterlibatan dalam dialog antar militer berfungsi untuk membangun persepsi positif terhadap TNI dan Indonesia di mata komunitas global. Hal ini secara tidak langsung memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam forum-forum strategis.

Dengan demikian, peran TNI sebagai instrumen soft power tidak kalah penting dibandingkan fungsi konvensional sebagai penjaga kedaulatan. Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia yang adaptif, kooperatif, dan berbasis pengaruh strategis yang positif. Sehingga disini dengan jelas bahwa TNI mengutamakan pendekatan lunak lebih relevan daripada konfrontatif. "Alih-alih mengikuti tren belanja militer global, Indonesia mengedepankan diplomasi pertahanan yang berbasis kerja sama dan pengaruh



strategis lunak.” (Diplomasi Pertahanan Indonesia di Tengah Lonjakan Belanja Militer Global, Kumparan).

Tantangan dan Hambatan Diplomasi TNI

Di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang ditandai oleh rivalitas antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia menghadapi tantangan strategis dalam menjaga posisi dan relevansinya. Diplomasi pertahanan yang dijalankan melalui peran TNI tidak hanya diukur dari keaktifan dalam forum-forum regional, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam blok-blok kekuatan yang saling bersaing.

Seperti disampaikan oleh salah satu pejabat Kementerian Luar Negeri, *“Tantangan terbesar dalam diplomasi pertahanan adalah menjaga relevansi posisi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang di tengah rivalitas besar...”*. Pernyataan ini mencerminkan tantangan utama Indonesia dalam mengartikulasikan strategi luar negeri bebas-aktif, khususnya dalam merespons eskalasi militer dan ketegangan politik di Laut Cina Selatan.

Dengan posisi geografis yang strategis serta status sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dituntut untuk terus mengelola diplomasi pertahanan secara cermat, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika kekuatan global, tanpa kehilangan kredibilitas dan kepemimpinan regionalnya.

Meskipun peran diplomasi TNI telah menunjukkan kontribusi strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dari sisi internal, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, khususnya dalam hal alutsista dan dukungan logistik yang memadai untuk mendukung kehadiran operasional di wilayah perbatasan seperti Natuna Utara. Hal ini disampaikan oleh responden dari Staf Operasi TNI yang menyatakan bahwa keberhasilan diplomasi

TNI di kawasan LCS sangat bergantung pada kesiapan operasional dan keandalan sistem dukungan pertahanan.

Pertama, tantangan eksternal yang utama berasal dari meningkatnya rivalitas kekuatan besar di kawasan, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Rivalitas ini menciptakan tekanan geopolitik yang rumit, karena Indonesia dituntut menjaga posisi netral namun tetap aktif dalam menjaga wilayah yurisdiksinya. Ketegangan antara prinsip “bebas aktif” dan realitas militerisasi kawasan menyebabkan diplomasi TNI berada dalam posisi sulit untuk menjaga keseimbangan antara keterlibatan dan netralitas strategis.

Kedua, adanya strategi *grey zone conflict* yang dilakukan oleh aktor tertentu, khususnya Tiongkok, melalui kehadiran kapal milisi maritim, *coast guard*, serta kapal ikan berbendera sipil, menjadi hambatan dalam pelaksanaan diplomasi TNI. Situasi ini mempersulit pendekatan diplomatik karena karakter ancaman yang tidak terang-terangan, namun terus-menerus menguji batas kesabaran dan kehadiran militer Indonesia.

Ketiga, dari sisi internal, masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan koordinasi antarinstansi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden, “Selama belum ada mekanisme tetap antarinstansi, sinergi pelaksanaan diplomasi akan terkendala, termasuk dalam mengevaluasinya.” Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya sinergi antara Kemhan, TNI, dan Kemlu turut mempengaruhi keberhasilan diplomasi pertahanan.

Keempat, terdapat keterbatasan pada aspek sumber daya manusia dan kelembagaan TNI yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran TNI dalam aktivitas kerja sama pertahanan di tingkat internasional. Tidak semua perwira memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsi representasi TNI dalam forum multilateral maupun negosiasi teknis bidang pertahanan. Program peningkatan kapasitas terkait kerja sama pertahanan dan hubungan luar negeri masih bersifat parsial serta belum terintegrasi secara menyeluruh dalam doktrin OMSP.



Kelima, dari perspektif legal-institusional, TNI belum memiliki representasi tetap dalam beberapa forum strategis kawasan, sehingga bergantung pada diplomasi sipil atau jalur kementerian lainnya. Padahal, untuk membangun *strategic trust* yang efektif, kehadiran aktor militer secara konsisten dalam forum pertahanan regional sangat dibutuhkan.

Dari sudut pandang teori realisme, tantangan-tantangan ini memperlihatkan adanya keterbatasan negara dalam menggunakan instrumen kekuatan secara efektif di tengah tekanan sistem internasional yang tidak stabil. Sementara dari teori diplomasi pertahanan, keberhasilan diplomasi TNI memerlukan struktur koordinasi nasional yang kokoh, serta kemampuan diplomatik yang sepadan dengan kompleksitas ancaman yang dihadapi.

Dengan demikian, tantangan dalam pelaksanaan diplomasi TNI di kawasan LCS merupakan kombinasi dari tekanan eksternal dan kekurangan internal. Mengatasi hambatan-hambatan ini adalah prasyarat mutlak bagi optimalisasi diplomasi pertahanan Indonesia sebagai bagian dari strategi keamanan nasional.

Strategi Penguatan dan Koordinasi Diplomasi TNI

Dalam menghadapi kompleksitas ancaman kawasan dan cepatnya perubahan konstelasi geopolitik, strategi penguatan diplomasi TNI tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran fisik atau kerja sama teknis militer. Diperlukan juga pembangunan narasi strategis yang sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa diplomasi TNI tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari diplomasi nasional yang konsisten di setiap forum internasional.

Hal ini ditegaskan oleh salah satu pejabat di Pusat Kajian Strategis TNI (Pusjiantra TNI) yang menyatakan bahwa "*diplomasi TNI harus dibarengi narasi strategis Indonesia yang konsisten di forum global.*" Pernyataan ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar-lembaga, khususnya antara TNI, Kementerian Luar Negeri, dan



Kementerian Pertahanan, dalam merumuskan dan menyampaikan posisi Indonesia secara terpadu. Dengan membangun narasi strategis yang seragam, diplomasi TNI dapat memperkuat persepsi internasional terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian kawasan dan menolak segala bentuk provokasi militer di Laut Cina Selatan.

Berdasarkan temuan penelitian dan wawancara dengan narasumber dari Kemhan, Sops TNI, serta pakar strategis, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas diplomasi TNI dalam menjaga stabilitas nasional.

Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas internal melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) TNI dalam bidang diplomasi internasional menjadi fondasi utama. Perwira TNI perlu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang hubungan internasional, hukum laut internasional, dan keterampilan negosiasi strategis. Pelatihan khusus dalam bentuk pendidikan pertahanan luar negeri, kursus bahasa asing, dan penugasan di perwakilan militer di luar negeri harus diperluas secara sistemik (Wawancara dengan pejabat di Sops TNI, 2025). Peningkatan kualitas diplomasi TNI dari sisi internal menuntut adanya penguatan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat langsung dalam tugas-tugas diplomasi internasional. Dalam perspektif **Teori Diplomasi Pertahanan**, pengembangan SDM TNI bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian integral dari strategi pertahanan non-tempur yang berfungsi membangun kepercayaan, menciptakan saluran komunikasi militer yang terbuka, serta memperkuat hubungan bilateral dan multilateral secara damai.

Selaras dengan Konsep Diplomasi TNI, kemampuan personel TNI di bidang diplomasi perlu ditingkatkan agar mampu berperan sebagai representasi negara dalam berbagai forum pertahanan global. Hal ini mencakup penguasaan terhadap isu-isu strategis seperti hubungan internasional, hukum laut internasional, serta teknik negosiasi dalam konteks keamanan regional. Upaya ini dapat diwujudkan



melalui program pendidikan dan pelatihan yang lebih terstruktur, seperti pengiriman perwira TNI untuk mengikuti pendidikan militer luar negeri, kursus bahasa asing yang relevan, serta penempatan pada posisi atase pertahanan di kedutaan besar Indonesia di luar negeri.

Melalui kaca mata kedua teori tersebut, peningkatan kompetensi personel TNI dalam ranah diplomasi bukan hanya mendukung profesionalisme individu, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan keamanan regional, khususnya dalam menyikapi tantangan di kawasan seperti Laut Cina Selatan. Dengan kata lain, diplomasi TNI menjadi alat strategis yang memperluas ruang pengaruh Indonesia tanpa mengandalkan kekuatan militer secara langsung.

Kedua, membangun **infrastruktur kelembagaan TNI** dan **mekanisme kerja yang mendukung**, agar pelaksanaan fungsi diplomasi pertahanan dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan. Berdasarkan **Teori Diplomasi Pertahanan**, keberhasilan kegiatan militer non-tempur dalam ranah hubungan internasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu prajurit, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi, jalur koordinasi antar lembaga, serta tersedianya sistem yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas diplomatik secara formal dan terorganisir.

Dalam hal ini, **penguatan struktur kelembagaan TNI**, seperti optimalisasi fungsi Pusat Kerja Sama Internasional (Puskersin) TNI, staf operasional terkait kerja sama luar negeri, dan penguatan peran atase pertahanan di kedutaan besar RI, menjadi aspek krusial. Upaya ini juga mencakup pembentukan dan penguatan prosedur operasional standar, pengembangan sistem informasi strategis untuk menunjang aktivitas kerja sama internasional, serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga lainnya.

Melalui kaca mata Konsep Diplomasi TNI, penguatan infrastruktur ini merupakan pondasi penting agar TNI dapat terlibat secara aktif, terencana, dan profesional dalam forum internasional. Tanpa adanya sistem kelembagaan yang kuat,



diplomasi TNI berisiko bersifat insidental dan kurang mampu menjawab tantangan strategis seperti meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, pembangunan mekanisme pendukung yang modern, responsif, dan sinergis menjadi prasyarat bagi transformasi diplomasi TNI menjadi alat strategis pertahanan negara dalam menjaga kepentingan nasional dan stabilitas kawasan.

Penguatan infrastruktur dan mekanisme pendukung diplomasi TNI termasuk juga penguatan sinergi lintas sektoral antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri menjadi prasyarat agar diplomasi militer berjalan searah dengan kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. Salah satu narasumber menyebutkan bahwa hingga kini belum terdapat *kerangka koordinasi tetap* untuk kegiatan diplomasi militer, sehingga pelaksanaannya sering bersifat sporadis dan belum terukur dampaknya terhadap tujuan strategis nasional (Wawancara dengan pejabat Kementerian Pertahanan RI, 2025).

Ketiga, penguatan peran diplomasi TNI juga perlu diarahkan pada peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama keamanan kawasan, terutama melalui mekanisme multilateral atau trilateral yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika ancaman kontemporer. Dalam konteks Teori Diplomasi Pertahanan, keterlibatan dalam kerja sama keamanan terbatas ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan konfrontatif menuju strategi kooperatif berbasis kepercayaan dan kepentingan bersama antar negara kawasan.

Sebagaimana dikemukakan oleh pakar pertahanan Dr. Evan A. Laksmana, inisiatif trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina dalam mengamankan wilayah Laut Sulu menunjukkan efektivitas model kerja sama terbatas dalam menangani ancaman non-tradisional, seperti terorisme maritim dan kejahatan lintas batas. Keberhasilan model ini menjadi referensi penting untuk dikembangkan di wilayah strategis lainnya, seperti Laut Natuna Utara, dengan melibatkan negara mitra yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga stabilitas dan kebebasan navigasi.



Dalam kerangka Konsep Diplomasi TNI, keterlibatan aktif dalam format kerja sama minilateral ini mempertegas fungsi TNI tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan dalam negeri, tetapi juga sebagai aktor diplomatik regional yang mampu membangun jejaring strategis dalam menghadapi kompleksitas ancaman lintas batas. Pendekatan ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran sentral secara lebih leluasa dibandingkan dalam forum multilateral yang sering kali tersandera kepentingan negara besar.

Keempat, penguatan landasan normatif dan kebijakan institusional dalam pelaksanaan diplomasi TNI, yang mencakup penyusunan **kerangka regulasi, mekanisme penanganan krisis**, serta pembentukan **doktrin diplomasi TNI** secara formal dan menyeluruh. Dalam perspektif **Teori Diplomasi Pertahanan**, kejelasan regulasi dan doktrin berfungsi sebagai panduan strategis yang membedakan peran militer dalam konteks diplomatik dari fungsi-fungsi militer konvensional.

Hingga saat ini, belum terdapat **rumusan doktrin resmi** yang secara eksplisit mengatur bagaimana TNI menjalankan diplomasi, termasuk prinsip-prinsip dasar, batas kewenangan, serta pendekatan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Ketiadaan doktrin ini menyebabkan pelaksanaan diplomasi TNI kerap bersifat **situasional dan bergantung pada tafsir individual pejabat**, bukan sebagai bagian dari kebijakan pertahanan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam kerangka Konsep Diplomasi TNI, pembentukan doktrin sangat penting agar diplomasi TNI dapat dijalankan secara konsisten, profesional, dan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis global maupun kawasan. Doktrin ini harus mampu menjembatani antara kepentingan politik luar negeri Indonesia dengan mandat pertahanan negara, serta memberikan acuan yang jelas bagi satuan-satuan TNI yang terlibat dalam interaksi internasional.

Dengan adanya doktrin yang kuat dan kerangka kebijakan yang mendukung, TNI akan memiliki **pegangan institusional** dalam menghadapi tantangan diplomatik, termasuk dalam situasi krisis yang memerlukan respons cepat namun terukur.



Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas diplomasi pertahanan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan keamanan kawasan.

Kelima, menyoroti pentingnya optimalisasi peran TNI dalam **membangun narasi strategis dan persepsi internasional**, melalui keterlibatan aktif dalam **jalur diplomasi non-tradisional**, seperti **diplomasi Track 1.5 dan Track 2**. Dalam konteks **Teori Diplomasi Pertahanan**, pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak semata dijalankan melalui kanal formal antar pemerintah (*Track 1*), tetapi juga melalui forum yang lebih fleksibel, yang melibatkan aktor non-negara namun tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan.

Melalui Konsep Diplomasi TNI, keterlibatan dalam forum semi-resmi dan informal — seperti dialog strategis bersama **akademisi, think tank, serta mitra pertahanan asing** — menjadi instrumen penting dalam memperkuat **kehadiran dan pengaruh strategis Indonesia**. Kehadiran TNI dalam ruang-ruang ini memungkinkan perluasan kanal komunikasi informal yang lebih cair, namun tetap berdampak dalam membentuk **kepercayaan strategis (strategic trust)**, khususnya dalam situasi ketika saluran diplomasi formal mengalami tekanan atau kebuntuan.

Pendekatan ini juga berfungsi untuk **menyampaikan narasi Indonesia secara konsisten dan konstruktif**, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti konflik di Laut Cina Selatan. Melalui diplomasi berbasis dialog terbuka, TNI dapat mengklarifikasi posisi Indonesia, memperkuat aliansi strategis non-blok, serta memitigasi potensi kesalahpahaman antar negara.

Dengan memperluas partisipasi dalam diplomasi *Track 1.5* dan *Track 2*, diplomasi TNI tidak hanya berperan dalam representasi simbolik, tetapi juga menjadi agen aktif dalam proses pembentukan opini strategis kawasan, serta instrumen diplomatik yang adaptif dan bernuansa.

Secara teoritis, langkah-langkah ini sejalan dengan pendekatan *Defense Diplomacy* yang tidak hanya menitikberatkan pada pembentukan aliansi, tetapi juga pada pencegahan konflik dan pembangunan rasa saling percaya antarnegara (Cottey,



A., & Forster, A., 2004). Dalam kerangka Realisme, penguatan kapasitas TNI dan kerja sama regional mencerminkan upaya untuk meningkatkan daya tawar Indonesia dalam konstelasi kekuatan yang asimetris (Waltz, K., 1979). Sementara dalam perspektif *Regional Security Complex Theory (RSCT)*, langkah-langkah ini memperkuat Indonesia sebagai aktor sentral dalam menjaga keseimbangan kawasan Indo-Pasifik (Buzan, B., & Wæver, O., 2003).

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara terpadu dan konsisten, TNI tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai aktor diplomasi strategis yang mampu meredam ketegangan, menjaga kedaulatan, dan mendorong stabilitas nasional di tengah tekanan geopolitik Laut Cina Selatan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi TNI memiliki peran strategis dalam merespons dinamika konflik di Laut Cina Selatan yang berimplikasi langsung terhadap stabilitas nasional Indonesia. Diplomasi TNI telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Ke depan, peran ini perlu terus diperkuat melalui sinergi antar instansi, modernisasi pertahanan, dan diplomasi cerdas yang adaptif terhadap dinamika geopolitik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Pertama, diplomasi TNI berperan penting dalam menjaga kepentingan nasional di tengah rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Diplomasi TNI dilaksanakan melalui kehadiran militer yang terukur, kerja sama pertahanan bilateral dan multilateral, serta partisipasi aktif dalam forum-forum regional seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan Western Pacific Naval Symposium (WPNS).



- b. Kedua, strategi diplomasi TNI dilakukan secara aktif baik melalui hubungan bilateral dengan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara-negara ASEAN, maupun melalui kerja sama regional yang bertujuan membangun kepercayaan, mencegah eskalasi konflik, dan memperkuat posisi tawar Indonesia dikawasan.
- c. Ketiga, efektivitas diplomasi TNI terbukti mampu menahan eskalasi ketegangan dan memperkuat stabilitas kawasan, selanjutnya ke depan dapat mengoptimalkan pemanfaatan forum kerja sama berupa trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina atau Indonesia-Malaysia-Vietnam. Untuk meningkatkan efektivitas diplomasi TNI, diperlukan optimalisasi Maritime Domain Awareness, penguatan kemitraan strategis dengan negara-negara middle power, serta sinkronisasi kebijakan antara Kemhan, Kemenlu, dan Mabes TNI. Selain itu, TNI perlu memiliki doktrin resmi diplomasi militer yang mengatur peran, pendekatan, dan batas pelibatan dalam kegiatan diplomasi pertahanan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi peningkatan efektivitas diplomasi TNI ke depan.

- a. TNI perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) TNI untuk mendukung pelaksanaan diplomasi, terutama dalam penguasaan bahasa asing, negosiasi, serta pemahaman terhadap dinamika hubungan internasional.
- b. TNI perlu membangun infrastruktur kelembagaan dan mekanisme kerja yang mendukung, agar pelaksanaan fungsi diplomasi pertahanan dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.



- c. Kemhan, Kemlu dan TNI melaksanakan penguatan peran diplomasi TNI yang diarahkan pada peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama keamanan kawasan, terutama melalui mekanisme minilateral atau trilateral yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika ancaman kontemporer. Pada format ini Indonesia dapat mengambil peran dominan atau leadership sebagai negara terbesar di Asia Tenggara untuk menjaga posisi tawar dan mendorong penyelesaian damai berbasis hukum laut internasional.
- d. Kemhan, Kemlu dan Mabes TNI harus meningkatkan sinergi lintas sektoral, agar kebijakan diplomasi pertahanan dapat terlaksana secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- e. Kemhan dan Mabes TNI melaksanakan penguatan landasan normatif dan kebijakan institusional dalam pelaksanaan diplomasi TNI, yang mencakup penyusunan kerangka regulasi, mekanisme penanganan krisis, serta pembentukan doktrin diplomasi TNI secara formal dan menyeluruh.
- f. Kemhan dan Kemlu perlu mempertahankan prinsip strategic autonomy serta diversifikasi kerja sama pertahanan dengan negara-negara middle power seperti Jepang, India, dan Australia, guna menghindari ketergantungan berlebihan kepada satu pihak.
- g. TNI perlu menyusun dan mengadopsi doktrin diplomasi militer sebagai pedoman resmi bagi pelaksanaan diplomasi pertahanan. Doktrin ini akan memberikan arah yang lebih jelas bagi peran militer dalam diplomasi, serta memperkuat posisi TNI sebagai aktor strategis dalam politik luar negeri Indonesia.
- h. Kemhan dan TNI meningkatkan pelibatan TNI dalam forum-forum Track 1.5 dan Track 2 Diplomacy perlu diperluas untuk membangun kanal komunikasi informal, memperkuat kepercayaan strategis, dan memperluas pengaruh diplomasi pertahanan secara non-konfrontatif.

Diharapkan dengan penerapan langkah-langkah tersebut, peran strategis diplomasi TNI dalam menghadapi dampak konflik di Laut Cina Selatan dapat semakin optimal



dalam mendukung kepentingan nasional dan menciptakan stabilitas kawasan. Dapat dikatakan bahwa diplomasi TNI merupakan sarana strategis dalam pengelolaan dan resolusi konflik, dengan memanfaatkan komunikasi militer dan kerja sama pertahanan sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan meredakan krisis tanpa kekerasan. Dalam lingkungan keamanan kontemporer yang kompleks, peran TNI dalam diplomasi militer menjadi instrumen penting menjaga stabilitas nasional dan kawasan.

Daftar Pustaka

- Amadeus, S. (2024). *79 Tahun Sejarah Perjuangan Indonesia Merdeka Melalui Diplomasi*. Jakarta: Sahabat Museum KAA.
- Bakrie, C. R. (2020). *Handbook of Indonesian Defence Strategy*. Jakarta: LP3ES.
- Baylis, J., Wirtz, J., & Gray, C. S. (2018). *Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies (6th ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons.
- Buzan, B. (1991). *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era (2nd ed.)*. Boulder, CO: Lynne Rienner.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Gindarsah, I., & Laksmana, E. A. (2016). *Indonesia's Maritime Strategy Amidst the South China Sea Disputes*. Jakarta: CSIS.
- Hari Suyanto, Marsetio, Resmanto Widodo Putro, Aris Sarjito. (2025). *Sustainability Value of the Indonesian Archipelagic Sea Defense Strategy (SPLN) in Facing Grey Zone Operations in the North Natuna Sea*.



- Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. New York: Random House.
- Kraska, J. (2011). *Maritime Power and Law of the Sea: Expeditionary Operations in World Politics*. New York: Oxford University Press.
- Kumar, A., 2022. Understanding various traditions of the realism in international relations.
- Maharani, C. (2022). Indonesia's defence diplomacy in the Indo-Pacific era. *The Indonesian Quarterly*, 50(4), 45–58.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morgenthau, H. J. (1973). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (5th ed.). New York: Knopf.
- Marsetio, Laksamana TNI (Purn), 2024. *Sea Power Indonesia di Era Indo Pasifik*.
- Morán Blanco, S., 2025. The role of international relations theories for understanding current international society. Special emphasis on realism and the Ukrainian war.
- Nugroho, R.D.S. (2020). *Geopolitik Indonesia dan Tantangan Keamanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024.
- Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.



- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). Strategi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Panglima TNI. (2023). Pokok-Pokok Kebijakan Panglima TNI Tahun 2023. Jakarta: Mabes TNI.
- Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Darma Eka Karma.
- Raharja, D. P. (2022). ASEAN and the South China Sea dispute post-2020: Navigating new geopolitics. *Journal of ASEAN Studies*, 9(1), 15–30.
- Rakhmat, M. Z., & Nabbs-Keller, G. (2021). ASEAN centrality in the South China Sea disputes: Navigating between regionalism and national interests. *Contemporary Southeast Asia*, 43(2), 227–254.
- Specter, M.G., 2022. *The Atlantic realists: Empire and international political thought between Germany and the United States*. Stanford: Stanford University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Widodo, L. T. A. (2018). *Diplomasi Militer dalam Hubungan Internasional*. Jakarta: Gramedia.
- Williams, P. D. (2012). *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge.